

**PENGARUH REKRUTMEN POLITIK PARTAI KEADILAN DAN
PERSATUAN INDONESIA (PKP INDONESIA) TERHADAP
PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
KABUPATEN KAMPAR**

Oleh : Ririn Ayu Lestari

Email : ririnayulestari06@gmail.com

Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL. H.R.Soebrantas Km.12, Sim. Baru Pekanbaru, 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Political parties are formed to carry out their duties, mains and functions as a sub-system of democracy. There are 4 functions of political parties, namely political communication, political socialization, political recruitment and conflict management. The 2019 simultaneous general elections which were held on April 17, 2019 combined the legislative and presidential elections simultaneously. Legislative elections are elections for DPR RI, DPD, DPRD which are held simultaneously. In the context of legislative elections, parties must carry out one of the functions of political parties, namely as a means of public participation in political activities through the political recruitment process. This is also done by PKP Indonesia as a party that has long and experience in general elections but this year has interesting problems to research, namely 1). There was a shrinkage of the electoral areas that followed. 2). The occurrence of significant votes in electoral areas IV. 3). There was an increase in the vote acquisition by 47.9% in the first electoral district of Kampar Regency.

This study aims to examine the factors that are considered in Political Recruitment and the role of the Political Recruitment of the Indonesian Justice and Unity Party (PKP Indonesia) in the determination of legislative candidates for party performance (vote acquisition) in the 2019 General Election in Kampar Regency. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The location of this research was conducted in Kampar Regency. Data collection techniques used are through interviews and documentation. The data analysis technique used is an interactive analysis model.

The results of the study concluded that based on the researchers' observations and analysis, 1). PKP Indonesia implements an open recruitment mechanism where the requirements and procedures for presenting a character can be widely known so that all levels of society can register. 2). The modality that is highly considered by PKP Indonesia is social capital. This can be seen from recruiting legislative candidates based on the size of their influence in the community. 3). The implementation of the document that encourages PKP Indonesia to use the ball-pick method of legislative candidates shows that the cadre recruitment of legislative candidates in the Indonesian PKP Kampar

Regency is weak. 4). The recruitment strategy and pattern carried out by PKP Indonesia was quite successful even though it only passed 1 person to become a front member. Because the PKP Indonesia's target is to pass Kardinal Kasim as chairman to return to the seat of the Kampar Regency DPRD.

Keywords: *Recruitment, regeneration, 2019 elections, modalities, recruitment success factors*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Partai Politik menjadi komponen penting demokrasi. Definisi Partai Politik tertuang pada Undang –Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 1. Partai politik menjadi peserta dalam kompetisi perebutan kekuasaan di Indonesia. Pemilihan umum menjadi sarana legitimasi kekuasaan eksekutif maupun legislatif Sesuai yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selain itu, dijelaskan juga bahwa penyelenggara pemilu ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota adalah Partai Politik, yang telah ditetapkan lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum.

Dibentuknya partai politik untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya sebagai sub sistem dari demokrasi. Ada 4 fungsi partai Politik, yaitu Komunikasi politik, Sosialisasi politik, Rekrutmen politik dan pengelolaan konflik (Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2002). Pemilihan Umum serentak tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 menggabungkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara serentak. Dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik karangan Miriam Budiharjo

menyebutkan rekrutmen: “...proses mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai...” (Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2008)

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten tertua di Provinsi Riau dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Kota Pekanbaru yaitu 740.839, terdiri dari 21 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 242 Desa. Pada Pemilu 2019, Kabupaten Kampar memiliki DPT terbanyak kedua setelah Kota Pekanbaru, yaitu sebanyak 458,639 DPT. Sehingga Kabupaten Kampar menjadi daerah yang memiliki potensi tinggi dalam hal rekrutmen politik. Oleh karena itu, seharusnya Partai Politik mampu memaksimalkan pelaksanaan rekrutmen politik dengan baik.

Partai PKP Indonesia sudah berpengalaman menjadi peserta pemilihan legislatif, karena sudah dua kali mengikuti pemilu, yaitu pemilu tahun 2009 dan tahun 2014. Berpengalaman dibuktikan dengan terpilihnya kader PKP Indonesia menjadi anggota DPRD Kabupaten Kampar sebanyak 1 orang yaitu Kardinal Kasim, SE, MM pada pemilu tahun 2014. Hal tersebutlah yang membuat penulis mengapa PKP Indonesia. Dalam mencapai visi/misi partai politik, maka PKP Indonesia dituntut untuk dapat melakukan rekrutmen dengan baik. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk

menjaring dan melatih calon – calon kader. Rekrutmen politik diatur dalam AD/ART Partai PKP Indonesia pada Bab VI tentang Dewan Pimpinan Kabupaten pasal 16 tentang tugas operasional DPK poin D yaitu “Melakukan pembinaan terhadap anggota dan menjaring calon anggota baru yang berdomisili di wilayah Kabupaten / Kota”. Berdasarkan hal diatas maka diketahui bahwa proses rekrutmen dan kaderisasi Partai PKP Indonesia dilaksanakan oleh DPK Partai PKP Indonesia yang berkedudukan di kabupaten/kota.

Partai PKP Indonesia yang sebelumnya bernama Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) ini seharusnya dapat melaksanakan rekrutmen politik dengan baik dan maksimal. Namun, fakta dilapangan diduga PKP Indonesia Kabupaten Kampar menghadapi kendala dalam merekrut calon anggota legislatifnya. Pernyataan diatas didukung dengan data dan fenomena yang akan dijelaskan pada identifikasi masalah. Salah satunya adalah karena Partai PKP Indonesia merupakan partai yang kadernya paling sedikit lolos menjadi calon legislatif diantara partai besar lainnya yang sudah berpengalaman menjadi peserta Pemilu. Hal diatas menjadi alasan kuat penulis kenapa memilih partai PKP Indonesia menjadi objek penelitian.

Alasan Penulis memilih meneliti partai PKP Indonesia dalam rentang waktu tahun 2018 karena sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua DPK Partai PKP Indonesia Kabupaten Kampar, Kardinal Kasim, SE. MM. bahwa seluruh rangkaian rekrutmen baik penjaringan, seleksi sampai penetapan bakal calon legislatif

dilaksanakan pada tahun 2018. Sehingga penelitian ini dapat dibatasi dan penjelasannya bisa fokus pada rekrutmen politik Partai PKP Indonesia dalam penentuan calon legislatif Partai PKP Indonesia pada pemilu 2019.

Berdasarkan hal di atas membuat penulis tertarik meneliti fenomena rekrutmen serta peran rekrutmen partai terhadap performa (perolehan suara) Partai PKP Indonesia pada Pemilu 2019 dalam sebuah penelitian Skripsi dengan judul **“Pengaruh Rekrutmen Politik Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Terhadap Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kampar”**.

B. Rumusan Masalah

- a. Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan dalam Rekrutmen Politik Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) dalam upaya meningkatkan perolehan suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kampar?
- b. Bagaimana proses Rekrutmen Politik Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) berpengaruh terhadap performa partai (perolehan suara) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kampar ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja Faktor Penentu Rekrutmen Politik Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) dalam Penetapan Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kampar.

- b. Untuk mengetahui peran Rekrutmen Politik Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) dalam Penetapan Calon Legislatif terhadap performa partai (perolehan suara) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kampar.

D. Manfaat Penelitian

- a. Teoritis: (1) Sebagai masukan dan bahan informasi tentang data empiris yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. (2) Dapat menambah khasanah pengetahuan jurusan ilmu pemerintahan.
- b. Praktis: (1) Bagi peneliti, sebagai wahana untuk dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan pada mata kuliah di jurusan Ilmu Pemerintahan. (2) Sebagai masukan bagi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) khususnya dalam hal rekrutmen. (3) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam hal pengetahuan partai politik khususnya rekrutmen politik. (4) Sebagai sumbangan data bagi pihak yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

a. Partai Politik

Menurut Neumann dalam (Budiardjo, 2008) Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang

berbeda. Salah satu fungsi dari partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik.

Partai Politik adalah sekelompok manusia yang dikumpulkan oleh kepentingan bersama, atau kemaslahatan menyeluruh yang didasari oleh ikatan keyakinan maupun keimanan atau atas dasar kekufuran dan kefasikan serta emaksiatan, atau atas dasar ikatan kelahiran atau kabilah suku dan nasab tertentu atau karena ikatan profesi dan bahasa atau apa saja bentuknya dari berbagai ikatan maupun sifat kemaslahatan yang mengharuskan manusia berkumpul atasnya dan mendukungnya (Al-Mubarakfuri, 2008).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Undang-Undang itu menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum (Arifin, 2015).

b. Rekrutmen Politik

Menurut (Suharno, 2004), rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik. Ada dua macam mekanisme rekrutmen politik. yaitu rekrutmen yang terbuka dan tertutup.

Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan system politik sebab tanpa elite yang mampu

melaksanakan peranannya, kelangsungan system politik akan terancam (Surbakti, 2010).

Menurut Czunowski dalam (Pamungkas, 2011) menjelaskan pentingnya rekrutmen politik dimana Rekrutmen politik menjadi penentu wajah partai di ruang public, siapa mereka, darimana asalnya, apa ideologinya, bagaimana pengalaman politiknya dan bagaimana kapasitas politiknya akan menjadi petunjuk awal wajah politik partai di ruang publik.

Selanjutnya Rush dan Althof (sahid, 2011) menjelaskan bahwa rekrutmen ini merupakan proses dua arah, dan sifatnya bisa formal dan tidak formal. Dikatakan sebagai proses dua arah karena individu-individunya mungkin mampu mendapatkan kesempatan atau mungkin didekati oleh orang lain, untuk kemudian bisa menjabat posisi-posisi tertentu. Rekrutmen disebut formal, jika para individu direkrut dengan terbuka melalui cara institusional berupaseleksi atau pemilihan. Disebut sebagai informal apabila para individu direkrut secara sendirian tanpa melaluicara institusional.

Hal ini selaras dengan yang diutarakan oleh *Mochtar Mas'oed* bahwa rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan sebagainya (Mas'oed, 2000).

Menurut Czudnowski dalam (Putra, 2004) mekanisme rekrutmen politik antara lain:

1. Rekrutmen terbuka, di mana syarat dan prosedur untuk

menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas.

2. Rekrutmen tertutup, dalam rekrutmen tertutup syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif.

- c. Modalitas dalam Konteslasi Politik

Modalitas dalam pemilihan calon legislatif memiliki peran penting, karena modal merupakan syarat inti untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. modal politik, modal sosial dan modal ekonomi, modal tersebut merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh calon legislative. Secara konseptual, tiga modal utama yang harus dimiliki calon legislatif adalah modal politik (*political capital*), modal sosial (*social capital*), dan modal ekonomi (*economical capital*) (Maridjan, 2010).

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Faktor-Faktor Penentu Rekrutmen Politik PKP Indonesia dalam Penetapan Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar

Salah satu fungsi dari partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik yaitu untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (Budiardjo, 2002).

Pamungkas menjelaskan pentingnya rekrutmen politik dimana Rekrutmen politik menjadi penentu wajah partai diruang publik. Siapa mereka. darimana asalnya. apa ideologinya. bagaimana pengalaman

politiknya. dan bagaimana kapasitas politiknya akan menjadi petunjuk awal wajah politik partai di ruang publik. Wajah partai di ruang publik sangat tergantung pada bagaimana rekrutmen politik dilakukan oleh partai politik (Pamungkas, 2011)

Rekrutmen ini merupakan proses dua arah, dan sifatnya bisa formal dan tidak formal. Dikatakan sebagai proses dua arah karena individu-individunya mungkin mampu mendapatkan kesempatan atau mungkin didekati oleh orang lain, untuk kemudian bisa menjabat posisi-posisi tertentu. Rekrutmen disebut formal, jika para individu direkrut dengan terbuka melalui cara institusional berupa seleksi atau pemilihan. Disebut sebagai informal apabila para individu direkrut secara sendirian tanpa melalui cara institusional, Rush dan Althof dalam (sahid, 2011).

1) Penjaringan

Partai PKP Indonesia Kabupaten Kampar kembali menjadi peserta pemilihan umum 2019 dalam memilih calon legislatif yang akan duduk di kursi Anggota DPRD Kabupaten Kampar. Hal yang dilakukan pertama kali dalam rekrutmen adalah penjaringan calon anggota legislatif. Penjaringan dilakukan dengan menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat baik dari perorangan maupun kelompok masyarakat melalui struktural partai di bawah DPP Partai. Penjaringan dilakukan kebawah yang dilakukan mulai suara dari seluruh aspek kader maupun simpatisan Partai PKPI dalam berbagai jenjang kepengurusan.

Rekrutmen calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Kampar ada beberapa tahap persiapan menjelang pelaksanaan rekrutmen

yaitu pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKP Indonesia di Kecamatan-kecamatan. DPC tersebut digerakkan oleh tokoh PKP Indonesia di daerahnya masing-masing sehingga jika ada kegiatan kepartaian yang membutuhkan orang/massa yang banyak maka DPC-DPC diatas yang akan ditugaskan untuk mengumpulkan anggota.

Penunjukan ketua DPC dibuktikan dengan surat keputusan Nomor : 15.07.17/SKEP/DPK-PKP IND/KPR/II/2017 Tentang susunan dan personalia Dewan Pimpinan Kecamatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPC-PKP Indonesia) masa bakti 2017-2022. Diterbitkan pada tanggal 05 Mei Tahun 2017. Hal ini diperlukan sebagai proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik (Suharno, 2004).

Seluruh elemen PKP Indonesia Kabupaten Kampar berusaha mempromosikan pendaftaran partainya melalui media sosial yang berisi konten tentang ajakan untuk mendaftar dan cara mendaftar menjadi caleg PKP Indonesia Kabupaten Kampar pada Pemilu 2019. Namun, metode ini diakui tidak efektif dan efisien maka DPK PKP Indonesia Kabupaten Kampar menginstruksikan untuk seluruh DPC harus mampu menjaring calon legislatif yang berpotensi dan berkompeten dengan metode jemput bola.

2) Penyaringan

Penyaringan merupakan proses seleksi seluruh peserta rekrutmen yang telah memenuhi persyaratan ditahap penjaringan sebelumnya.

Penyaringan pada pembahasan ini merupakan rekrutmen politik Calon Anggota Legislatif Partai PKPI untuk berkompetisi menjadi anggota DPRD Kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini penyaringan dan seleksi calon anggota legislatif dari seluruh peserta calon legislatif dianalisis menggunakan teori modalitas yang dikemukakan oleh Kacung Maridjan (Maridjan, 2010), antara lain:

(1) Modal Ekonomi

Majunya seorang caleg dalam pemilihan umum memerlukan modal ekonomi untuk menunjang semua kebutuhan kampanye atau dana politik.

Modal ekonomi tersebut berupa kekayaan (finansial, material sumbangan atau pribadi), kekuatan pengaruh dalam masyarakat di bidang ekonomi, birokrat pemerintahan (Maridjan, 2010).

PKP Indonesia tidak memungut biaya pendaftaran bagi bakal calon legislatif karena seluruh biaya yang dibutuhkan PKP Indonesia dalam melaksanakan rekrutmen calon legislatif ditanggung oleh Kardinal Kasim selaku ketua PKP Indonesia Kabupaten Kampar. Bahkan khusus calon legislatif perempuan, DPK PKP Indonesia Kabupaten Kampar membantu calon legislatif perempuan dalam memenuhi persyaratan yang mengeluarkan biaya seperti pemeriksaan Kesehatan, fotokopi berkas dll.

Namun dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa kekayaan finansial bakal calon legislatif PKP Indonesia bervariasi. Calon legislatif yang memiliki kekayaan finansial terbanyak yaitu H. Damhir dengan kekayaan sebesar Rp 2.370.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan kemudian diikuti

oleh Kardinal Kasim, SE, MM sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar. Berikut wawancara yang menjelaskan alasan DPK PKP Indonesia Kabupaten Kampar merekrut H. Damhir, S.Ag,

“H. Damhir, S.Ag itu paket lengkap, diajukan memang pengusaha yang ekonominya banyak juga tokoh masyarakat di Bangkinang Kota” (Wawancara dengan Muhammad Rofi Ketua DPC PKP Indonesia Kecamatan Bangkinang Kota sekaligus Calon Legislatif PKPI, 22 Februari 2020 pada pukul 14.10 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa nama-nama yang diajukan menjadi calon legislatif tersebut diajukan oleh DPC yang aktif di Kabupaten Kampar. M. Rofi selaku Ketua DPC PKP Indonesia Kecamatan Bangkinang Kota merekrut H. Damhir, S.Ag untuk menjadi calon legislatif. H. Damhir, S.Ag direkrut karena pengusaha yang sukses dan dipandang sebagai tokoh masyarakat di Kecamatan Bangkinang sehingga dinilai mampu menggali suara yang besar untuk memaksimalkan suara PKP Indonesia Kabupaten Kampar.

DPP PKP Indonesia pusat sudah menetapkan besaran biaya yang harus dibayar oleh calon legislatif yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Namun PKP Indonesia Kabupaten Kampar hanya meminta Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sebagian calon legislatif, karena khusus calon legislatif perempuan tidak dibayar apapun. Hal ini disebabkan karena calon legislative perempuan menjadi aspek penting dalam mengisi presentasi minimal caleg perempuan yaitu minimal 30%.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa DPK PKP Indonesia Kabupaten Kampar dalam merekrut Bakal Calon Legislatifnya tidak terlalu mempertimbangkan modal ekonomi calon.

(2) Modal Politik

Modal politik berarti adanya dukungan politik, baik dari rakyat maupun dari kekuatan-kekuatan politik yang dipandang sebagai representasi dari rakyat. Jabatan politik, pengalaman mengorganisasi masa, keturunan (bangsawan atau penguasa), kekuatan terhadap pengambilan keputusan publik, reputasi dan legitimasi merupakan modal penting yang harus dimiliki kandidat untuk memperoleh modal politik dengan maksimal (Maridjan, 2010).

Untuk memperoleh dukungan politik kandidat harus melakukan pendekatan dengan elit-elit politik, elit politik yang menduduki jabatan politik dan jabatan-jabatan strategis yang mempunyai peran penting dan pengaruh terhadap kelompok dan masyarakat (Haryanto, 2005).

Pendekatan dengan elit politik juga perlu dilakukan sebagai modal politik dalam konteks lokal. Modal politik berupa dukungan elit-elit politik lokal dari organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, jabatan politik, pengalaman mengorganisasi masa, keturunan (bangsawan atau penguasa), kekuatan terhadap pengambilan keputusan publik, reputasi dan legitimasi juga berpengaruh untuk kemenangan calon legislatif.

Ketua DPC Kecamatan Bangkinang Kota merekrut calon legislatif, DPC merekrut orang-orang yang dekat dengan Ketua DPC masing-masing cabang. Hal ini dilakukan karena

mempertimbangkan tingkat kemungkinan orang-orang tersebut bersedia direkrut menjadi calon legislatif.

Minimnya tokoh politik dan orang-orang yang dekat dengan penguasa dalam daftar bakal calon legislatif partai PKP Indonesia tidak membuat PKP Indonesia pesimis dalam menghadapi Pemilu 2019. Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara berikut ini.

“Tokoh politik itu tentu lebih memilih partai besar. Jadi kami memang minim tokoh politik tapi tetap optimis bisa lolos jadi dewan walaupun cuma 1 saja” (Wawancara dengan Epri Wardi (Komring) Selaku Ketua DPC PKP Indonesia Kecamatan Tambang sekaligus Calon Legislatif PKP Indonesia di Propinsi Riau, 18 Februari 2020 pada pukul 14.00 WIB).

Dalam wawancara diatas dijelaskan bahwa minimnya tokoh politik dalam daftar calon legislatif PKP Indonesia pada Pemilu 2019 karena biasanya tokoh politik lebih memilih mendaftarkan diri menjadi calon legislatif melalui partai besar. Namun PKP Indonesia optimis dapat mencapai targetnya yaitu meloloskan minimal 1 orang calon legislatif menjadi anggota DPRD Kabupaten Kampar.

PKP Indonesia Kabupaten Kampar dalam merekrut bakal calon legislatif tidak dominan mempertimbangkan modal politik calon dibuktikan dengan tidak memprioritaskan tokoh politik dari eksternal partai. Kemudian berdasarkan data dan informasi diatas dapat disimpulkan bahwa yang memiliki modal politik paling besar yaitu Kardinal Kasim, SE, MM selaku Ketua DPK Kabupaten

Kampar yang merupakan *incumbent* anggota DPRD Kabupaten Kampar dan yang kedua adalah Muhammad Kamil, SH yang merupakan mantan Kepala Desa Merangin selama dua periode.

(3) Modal Sosial

Modal sosial (*social capital*) dalam penelitian ini berkaitan dengan bangunan relasi dan kepercayaan (*trust*) yang dimiliki oleh caleg dengan masyarakat yang memilihnya. Termasuk didalamnya adalah sejauh mana caleg mampu meyakinkan para pemilih bahwa mereka memiliki kompetensi untuk mewakili daerahnya. Dalam hal ini modal sosial yang dibangun calon legislatif pada dapil 1 dan 4 dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Kampar.

Jaringan dalam dan luar negeri kandidat, status dalam masyarakat seperti pendidikan, agama, adat dan lain sebagainya, kekuatan pengaruh dalam masyarakat lalu pengurus organisasi besar dan terhormat merupakan sarat penting dalam modal sosial. Suatu kepercayaan tidak akan tumbuh begitu saja tanpa didahului oleh adanya pengenalan dan status sosial (Maridjan, 2010).

Berdasarkan penelitian yang mengkaji tentang modal sosial yang dimiliki oleh calon legislative PKP Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rekrutmen oleh PKP Indonesia Kabupaten Kampar sangat mempertimbangkan modal sosial yang dimiliki oleh seorang calon legislatif seperti tokoh maupun suku setempat. Dapat disimpulkan bahwa PKP Indonesia merekrut calon legislatif berdasarkan besarnya pengaruhnya ditengah masyarakat sehingga secara tidak langsung PKP Indonesia mempertimbangkan tingkat modal sosial seseorang tanpa

mengesampingkan modal-modal yang lain.

3) Penetapan dan Analisis Rekrutmen Politik Partai PKPI Kabupaten Kampar

Tahap ini menunjukkan hasil dari penjaringan dan penyaringan yang dilakukan oleh PKP Indonesia Kabupaten Kampar. Berikut daftar nama peserta yang mendaftar menjadi Calon Legislatif melalui PKP Indonesia Kabupaten Kampar. Kemudian setelah melalui penyaringan oleh PKP Indonesia Kabupaten Kampar, berikut daftar nama yang ditetapkan menjadi calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Kampar pada pemilu 2019 melalui partai PKP Indonesia Kabupaten Kampar.

Dalam pembahasan dan analisis ini disampaikan faktor penyebab buruknya rekrutmen partai menurut Syamsudiin Haris, dikemukakan bahwa buruknya rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik disebabkan oleh 1) Faktor primordial seperti agama, suku, daerah hingga komunitas dalam pandangan yang sama seperti komunitas hobi dll. 2). Selanjutnya faktor kesetiaan seseorang terhadap ideologi partai hingga loyalitas terhadap petinggi partai. 3). Kedekatan dengan petinggi partai mampu mengantarkan yang bersangkutan menjadi calon legislatif (Syamsuddin Haris dkk, 2016).

PKP Indonesia merekrut dengan menjaring para bakal calon yang memiliki keterkaitan primordial, baik dengan pemilih maupun petinggi partai. Hal ini dibuktikan dengan calon legislatif dari etnis ocu dan minang, kemudian mayoritas agama islam dengan 2 orang non islam. Selanjutnya kebanyakan caleg berdomisili di Bangkinang.

Berdasarkan seluruh pemaparan diatas tentang dinamika pelaksanaan rekrutmen serta faktor-faktor yang menentukan lolos tidaknya seseorang menjadi calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Kampar melalui PKP Indonesia pada Pemilihan Umum 2019. Dapat disimpulkan hasil-hasil penelitian sebagai berikut : (1) Pelaksanaan rekrutmen PKP Indonesia dilakukan sebanyak 2 kali yaitu sebelum pengumuman verifikasi peserta pemilu 2019 dan setelah lulus menjadi peserta pemilu 2019. (2) PKP Indonesia menerapkan mekanisme rekrutmen terbuka dimana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mendaftar. Hal ini dibuktikan dengan ; pertama, PKP Indonesia sudah membuka pendaftaran bakal calon legislatif dengan hasil 43 pendaftar. Namun, permasalahan ditingkat nasional terkait verifikasi peserta pemilu 2019 menyebabkan para pendaftar mengundurkan diri dan beralih mendaftar ke partai lain. Kedua, setelah diloloskan menjadi peserta pemilu 2019 oleh PTUN maka PKP Indonesia melakukan rekrutmen kedua dengan metode berbeda yaitu menjemput bola (menjemput langsung) orang-orang yang dinilai mampu meningkatkan perolehan suara partai dengan tetap membuka peluang bagi masyarakat luas untuk mendaftar menjadi calon legislatif melalui PKP Indonesia Kabupaten Kampar. (3) Rekrutmen kedua PKP Indonesia Kabupaten Kampar menggunakan Strategi Defensif dan Ofensif dalam satu waktu. Strategi Defensif dengan focus mempertahankan suara di dapil 1 dan 4 tanpa berupaya memaksimalkan suara di dapil lain.

Kemudian Strategi Ofensif diterapkan di dapil 1 dengan memaksimalkan perwakilan di dapil 1 yaitu 10 kursi sehingga dapat memperoleh suara tinggi bagi partai. (4) Modalitas yang sangat dipertimbangkan oleh PKP Indonesia yaitu modal Sosial. Hal ini dapat dilihat karena merekrut calon legislatif berdasarkan besarnya pengaruhnya ditengah masyarakat sehingga secara tidak langsung PKP Indonesia mempertimbangkan tingkat modal sosial seseorang tanpa mengesampingkan modal-modal yang lain. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada modalitas yang dominan dalam merekrut calon legislatif karena PKP Indonesia memilih calon legislatif berdasarkan akumulasi dari modalitas yang dimiliki oleh calon.

PKP Indonesia juga menghadapi tantangan dalam proses kaderisasi. Masalahnya yaitu belum memiliki sistem kaderisasi yang jelas, sehingga sumber rekrutmen politik cenderung bersifat oligarkis. Pola rekrutmen masih mengikuti garis yang ditentukan oleh faktor-faktor primordial seperti agama, hubungan daerah, kesamaan daerah, serta faktor-faktor kesetiaan dan kedekatan dengan pimpinan teras partai (Haris, 2005). Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan rekrutmen yang mendorong PKP Indonesia melakukan metode jemput bola calon legislatif menunjukkan bahwa lemahnya kaderisasi rekrutmen calon legislatif di dalam tubuh PKP Indonesia Kabupaten Kampar.

Sumber rekrutmen politik dari lingkungan keluarga dan kerabat politik para elite parpol itu sendiri, sehingga cenderung berlangsung tertutup, eksklusif, dan nepotis. Meskipun ada prosedur formal yang dimiliki parpol dalam proses

rekrutmen, namun dalam realitasnya prosedur tersebut tidak sepenuhnya diimplementasikan oleh pimpinan parpol. Hampir tidak ada tradisi berorganisasi secara rasional, kolegial, demokratis, dan bertanggung jawab di dalam partai-partai karena tidak jarang keputusan dan pilihan politik ditentukan secara sepihak dan oligarkis oleh segelintir atau bahkan seorang pemimpin partai. (Haris, 2014). Namun pada rekrutmen yang dilakukan oleh PKP Indonesia Kabupaten Kampar terlihat rekrutmen dilaksanakan begitu terbuka hanya saja minat masyarakat rendah untuk mencalonkan diri melalui PKP Indonesia Kabupaten Kampar sehingga Partai didorong untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang solutif. salah satu kebijakan tersebut yaitu rekrutmen dengan metode menjemput bola yang pada akhirnya hanya mencapai orang-orang yang dekat dengan pemimpin partai, yang setia dengan partai dan terkesan primordial sehingga pilihan politik dan hasil seleksi ditentukan secara sepihak oleh pimpinan partai. Seluruh pemaparan diatas disebabkan oleh belum terbangunnya sistem rekrutmen politik yang baku, terbuka, demokratis, dan akuntabel di kalangan umumnya parpol di Indonesia. Sebagian parpol mendasarkan sumber rekrutmen politik dari lingkungan keluarga dan kerabat politik para elite parpol itu sendiri (Syamsuddin Haris dkk, 2016).

b. Proses Rekrutmen Politik PKP Indonesia Mempengaruhi Performa Partai (Perolehan Suara) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar

Pada Pemilu 2019 PKP Indonesia harus berjuang keras untuk dapat lolos menjadi peserta Pemilu 2019 karena hasil verifikasi KPU RI menyatakan bahwa PKP Indonesia tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon peserta Pemilu 2019. Keputusan KPU RI ini benar-benar berdampak bagi PKP Indonesia di kabupaten/kota khususnya Kabupaten Kampar. Hal ini membuat bakal calon legislatif yang sudah mendaftar ke PKP Indonesia keluar dan mendaftar ke partai lain.

Selanjutnya PKP Indonesia menggugat keputusan KPU RI tersebut melalui Bawaslu RI. Sementara hasil pemeriksaan Bawaslu menunjukkan PKP Indonesia gagal memenuhi syarat tersebut karena tidak mencapai 75% di keempat propinsi yang menjadi bahan gugatan. Sehingga Bawaslu memutuskan menolak permohonan pemohon (PKP Indonesia) untuk seluruhnya. PKP Indonesia tingkat kabupaten/kota merasa sulit dalam mengambil keputusan karena saat itu PKP Indonesia masih belum dinyatakan lulus sebagai peserta Pemilu 2019 sedangkan waktu pendaftaran sudah tinggal sebulan lebih. DPP PKP Indonesia menggugat keputusan KPU RI dan Bawaslu RI sebelumnya ke Pengadilan Tinggi Urusan Negara (PTUN). Pada akhirnya PTUN memenangkan gugatan PKP Indonesia sehingga dapat lolos menjadi peserta Pemilu 2019.

Pada akhirnya PKP Indonesia diloloskan menjadi peserta pemilu 2019 sehingga dapat melaksanakan rekrutmen sampai pada tahapan kampanye. Namun, kendala-kendala tersebut menghabiskan banyak waktu sehingga ketika sudah diputuskan lolos tapi pendaftaran yang

ditetapkan KPU sudah hampir tutup. Kemudian kendala tersebut menyebabkan bakal calon legislatif yang sudah mendaftar di PKP Indonesia malah mendaftar ke partai lain.

Permasalahan yang dipaparkan diatas mendorong DPK PKP Indonesia Kabupaten Kampar harus berfikir lebih matang terkait strategi rekrutmen yang akan dilaksanakan mengingat waktu yang semakin mendekati penutupan pendaftaran bakal calon legislatif KPU Kabupaten Kampar dan metode penghitungan yang berbeda dari Pileg sebelumnya. Sehingga PKP Indonesia harus bekerja lebih keras dalam merekrut calon legislatif dengan metode jemput bola yang dinilai paling efektif dan efisien.

Hal-hal di atas mendorong Kardinal Kasim, SE, MM yang merupakan *incumbent* anggota DPRD Kabupaten Kampar periode 2014-2019 untuk melaksanakan rekrutmen yang dapat memperbesar peluangnya kembali mendapatkan kursi anggota dewan. Dalam rekrutmen ini beliau menggunakan Strategi yaitu meningkatkan hasil suara partai di daerah pemilihannya dengan mengisi penuh dan memaksimalkan rekrutmen 30% perwakilan wanita di daerah pemilihan I. Hal tersebut dilakukan supaya dapil I bisa mendapatkan suara maksimal sehingga bisa mendapatkan minimal 1 kursi. Sebagai *incumbent* tentu Kardinal akan mendapatkan suara yang lebih tinggi dari caleg lain karena kardinal Kasim, SE, MM dinilai memiliki modalitas paling tinggi.

Rekrutmen yang dilakukan oleh PKP Indonesia Kabupaten Kampar tentunya guna memaksimalkan perolehan suara partai. Suara yang

diperoleh oleh calon legislatif tentunya berkaitan erat dengan latar belakang dan modalitas yang dimiliki masing-masing calon. Berikut target masa calon legislatif PKP Indonesia pada Pemilu 2019 yang diharap mampu memaksimalkan suara partai.

Daftar Calon Tetap (DCT) yang menyisakan 15 calon legislatif dan menggugurkan 3 bacaleg PKP Indonesia. Selanjutnya data di atas menunjukkan bahwa ruang lingkup dan batasan target masa dari calon legislatif PKP Indonesia tidak begitu jelas. Calon yang diharapkan memperoleh suara terbanyak pada daerah pemilihan I adalah Kardinal Kasim, SE, MM dan H. Damhir, S.Ag. Sedangkan target masa calon legislatif PKP Indonesia pada daerah pemilihan IV tidak terlalu diperhatikan dan hanya mengandalkan H. Mardius Syukur untuk menggalang suara keluarga besar Polri dan Elda Afrita, Amd, Keb untuk memperoleh suara dari tenaga medis.

Rekrutmen politik yang dilakukan oleh PKP Indonesia memiliki target yaitu mendudukkan minimal 1 calon untuk mendapatkan kursi anggota DPRD Kabupaten Kampar. Strategi dan pertimbangan modalitas yang dilakukan PKP Indonesia dalam merekrut calon legislatif akan dapat diketahui keberhasilannya setelah perolehan suara sudah diumumkan oleh KPU Kabupaten Kampar. Berikut hasil suara PKP Indonesia Kabupaten Kampar yang ditelaah berdasarkan perolehan suara perorangan calon legislatif PKP Indonesia Kabupaten Kampar.

KPU menyampaikan anggota DPRD Kabupaten Kampar terpilih melalui Keputusan KPU Kabupaten

Kampar Nomor: 48/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/VII/2019

Tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan suara Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Adapun nama-nama anggota DPRD Kabupaten Kampar terpilih pada daerah pemilihan yang diikuti oleh PKP Indonesia yaitu daerah pemilihan I dan IV.

Dari seluruh pemaparan di atas terlihat PKP Indonesia menggunakan strategi Defensive dan Offensive sekaligus dalam rekrutmen politik yang dilakukan oleh PKP Indonesia. Defensive dengan menjaga suara di daerah pemilihan I dan mengabaikan dapil lain. Namun Offensive memaksimalkan usaha di daerah pemilihan I dengan harapan dapat meraih suara sebanyak-sebanyaknya.

Dapat disimpulkan bahwa strategi dan pola rekrutmen yang dilakukan oleh PKP Indonesia cukup berhasil walaupun hanya meloloskan 1 orang menjadi anggota depan. Karena memang target PKP Indonesia yaitu meloloskan Kardinal Kasim, SE, MM selaku ketua untuk kembali menduduki kursi DPRD Kabupaten Kampar. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa peran rekrutmen politik partai sangat mempengaruhi performa partai dan perolehan suara pemilu 2019 PKP Indonesia kabupaten Kampar.

Dapat disimpulkan bahwa strategi dan mekanisme rekrutmen yang dipersiapkan dan dilaksanakan secara matang dapat mempengaruhi performa partai walaupun partai yang termasuk kedalam kelompok partai kecil dan sepi peminat.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor Penentu Rekrutmen Politik Partai PKP Indonesia dalam Penetapan Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar: (1) Modalitas yang sangat dipertimbangkan oleh PKP Indonesia yaitu modal Sosial. Calon legislatif PKP Indonesia yang memiliki akumulasi Modalitas tertinggi yaitu Kardinal Kasim, SE, MM, H. Mardius Syukur, H. Damhir, S.Ag dan M. Kamil, SH; (2) Pola rekrutmen yang dilaksanakan yaitu aktif menjemput bola para calon legislatif yang dinilai memiliki potensi tinggi untuk menjadi calon legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya kaderisasi rekrutmen calon legislatif di dalam tubuh PKP Indonesia Kabupaten Kampar. Calon legislatif yang terjaring oleh rekrutmen partai yaitu mengikuti garis yang ditentukan oleh faktor-faktor primordial seperti agama, kesamaan daerah, serta faktor kesetiaan dan kedekatan dengan pimpinan teras partai. Pada rekrutmen yang dilakukan oleh partai PKP Indonesia Kabupaten Kampar terlihat rekrutmen dilaksanakan begitu terbuka hanya saja minat masyarakat rendah untuk mencalonkan diri melalui partai PKP Indonesia Kabupaten Kampar.
2. Peran Rekrutmen Politik PKP Indonesia dalam Penetapan Calon Legislatif Terhadap Performa Partai (Perolehan Suara) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar. Strategi dan pola

rekrutmen yang dilakukan oleh PKP Indonesia cukup berhasil walaupun hanya meloloskan 1 orang menjadi anggota depan. Karena memang target PKP Indonesia yaitu meloloskan kardinal kasim selaku ketua untuk kembali menduduki kursi DPRD Kabupaten Kampar. Dapat disimpulkan bahwa strategi dan mekanisme rekrutmen yang dipersiapkan dan dilaksanakan secara matang dapat mempengaruhi performa partai walaupun partai yang termasuk kedalam kelompok partai kecil dan sepi peminat.

B. Saran

1. Hendaknya DPC yang dibentuk ditinjau keaktifannya sehingga setiap DPC mampu melaksanakan tupoksinya membina kader PKP Indonesia Kabupaten Kampar.
2. DPK PKP Indonesia Kabupaten Kampar dapat melakukan perkaderan dengan keberlanjutan supaya menjelang Pemilihan Umum memiliki kader yang berkualitas.
3. Memaksimalkan DPC untuk sosialisasi PKP Indonesia kepada masyarakat dan mengedukasi kaum muda tentang perpolitikan yang baik.
4. Perbaikan dalam dokumentasi arsip/dokumen pada sekretariat DPK PKP Indonesia kabupaten Kampar hendaknya dilakukan segera karena penulis merasakan sendiri sulitnya mencari data yang seharusnya disimpan rapi oleh sekretariat DPK PKP Indonesia Kabupaten Kampar.
5. Hendaknya PKP Indonesia Kabupaten Kampar kembali berbenah dan memiliki kekhasan akan visi tersendiri serta

melakukan kegiatan menarik sehingga masyarakat menaruh perhatian khusus pada PKP Indonesia Kabupaten Kampar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adlin. (2012). *Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Agustinova, D. E. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: Calpulis.
- Al-Mubarakfuri, S. (2008). *Islam dan Partai Politik*. Jakarta: Pustaka At-Tazkia.
- Ancok. (2003). *Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat*. Yogyakarta: Gadjahmada Univercity.
- Arifin, A. (2015). *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bourdieu, P. (2002). *The Forms of Capital, in John G. Richardson (edt), Handbook of heory and Research in The sociology of Education*. Newyork: Greenwald press.
- Budiardjo, M. (2002). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Haris, S. (2005). *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Legislatif Pemilu 2004*. Jakarta: Gramedia.
- Haris, S. (2014). *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Haryanto. (2005). *Kekuasaan Elit (Suatu bahasan Pengantar)*. Yogyakarta: JIP UGM.

- Maridjan, K. (2010). *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Mas'ood, M. (2000). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Milles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pamungkas, S. (2011). *Partai Politik; Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Putra, F. (2004). *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sahid, K. (2011). *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2004). *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Syamsuddin Haris dkk. (2016). *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Peraturan Perundang - Undangan**
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke IV
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Peraturan KPU RI No 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
- Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor : 685/PL.01.1.Pu/1401/KPU.Kab /IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kampar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
- Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Keadilan Dan Peratuan Indonesia (PKP Indonesia) Ketetapan Kongres Luar biasa Partai PKP Indonesia tahun 2018.